

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN (SEKOLAH
INPRES) PADA MASA ORDE BARU: STUDI KASUS DI KECAMATAN
LUBUK BASUNG 1979-1994.**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim penguji untuk Memperoleh Gelar Sarjana pendidikan
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**RAZET EKA PUTRA
16046089**

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SRKISPI

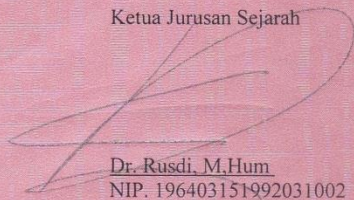
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN (SEKOLAH INPRES) PADA
MASA ORDE BARU : STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUK BASUNG 1979-1994.

Nama : Razet Eka Putra
BP/NIM : 2016/16046089
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2021

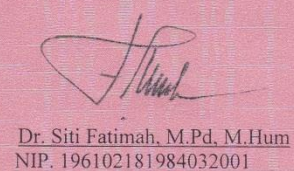
Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum
NIP. 196403151992031002

Pembimbing



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 196102181984032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Pada Hari Jumaat, 05 Februari 2021

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN (SEKOLAH INPRES) PADA
MASA ORDE BARU : STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUK BASUNG 1979-1994.**

Nama : Razet Eka Putra
BP/NIM : 2016/16046089
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

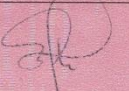
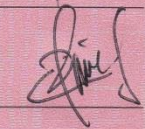
Padang, Februari 2021

Tim Penguji Tanda Tangan

Ketua : Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum

Anggota : 1. Drs. Zul Asri, M.Hum

2. Najmi, SS, M.Hum

1. 
2. 
3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Razet Eka Putra
BP/NIM : 2016/16046089
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

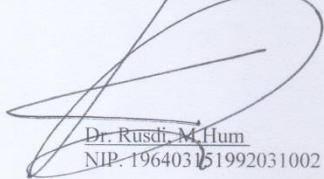
Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "**Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan (Sekolah Inpres) pada Masa Orde Baru: Studi kasus di Kecamatan Lubuk Basung 1979-1994**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa langsung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2021

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah


Dr. Rusdi M. Hum
NIP. 196403151992031002

Saya Menyatakan




Razet Eka Putra
NIM. 16046089

Abstrak

Razet Eka Putra, 16046089/2016. “Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan (Sekolah Inpres) Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung 1979-1994”. Skripsi. Jurusan Sejarah , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang , 2021.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Khususnya Sekolah Inpres Pada Masa Orde Baru di Kecamatan Lubuk Basung tahun 1979-1994. Permasalahan yang penulis angkat adalah tentang bagaimana latar belakang munculnya Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung dan bagaimana dampak pembangunan Sekolah Inpres terhadap masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu melalui 4 tahap yang meliputi, pertama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Heuristik adalah teknik pengumpulan data baik itu tertulis dan lisan. Sumber tertulis didapatkan dari studi pustaka yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, Sekolah Dasar Negeri 16 Kampung Parit, Sekolah Dasar Negeri 11 Puduk, Sekolah Dasar Negeri 56 Sikabu, Sekolah Dasar Negeri 49 Batu Hampar, Perpustakaan Pusat UNP, Perpustakaan FIS UNP, dan perpustakaan Labor Sejarah UNP. Sumber lisan, penulis dapatkan melalui wawancara dengan alumni SD Inpres, Penjaga Sekolah, serta Kepala Sekolah. Kritik sumber, yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal yang digunakan untuk menguji keaslian dan kebenaran sumber.

Interpretasi adalah menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan melalui kritik sumbe. Histiografi adalah penulisan hasil pengolahan data menjadi tulisan sejarah atau skripsi.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa dengan tingginya angka kelahiran sehingga pertumbuhan menjadi meningkat serta masih tingginya angka buta huruf di Kecamatan Lubuk Basung hal inilah yang menyebabkan dibangunnya Sekolah Inpres untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa sekolah. Sekolah Inpres dibangun tahun 1979 di Pudung, 1982 di BatuKambing, 1982 di Sikabu, 1982 di Batu Hampar. Dengan dibangunnya Sekolah Inpres ini juga memberikan dampak ke jenjang pendidikan SMP dan SMA dimana diadakannya penambahan pembangunan gedung sekolah SMP dan SMA. Namun diakhir tahun 1991an jumlah murid makin berkurang dikarenakan adanya program KB. Kemudian ditahun 1994 semua Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri.

Kata Kunci: SD Inpres, Lubuk Basung, Masa Orde Baru, tahun 1979-1994

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan pencipta danpemelihara alam semesta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dengan warisan petunjuk-Nya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi yang telah Allah utus untuk menjadi penerang bagi manusia dan menjadi teladan dalam berfikir dan berperilaku dalam masyarakat.

Alhamdulillah berkat Rahmat dan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang “ Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan (Sekolah Inpres) Pada Masa Orde Baru : Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung 1979-1994 ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah Banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum sebagai dosen pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
2. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum dan Ibu Najmi, SS, M.Hum sebagai tim penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi.
3. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum. sebagai Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Etni Hardi, M.Hum. sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sejarah, serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Sejarah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Amak, Ayah, Nenek, Andes, Rehan, dan semua keluarga, terimakasih atas dorongan dan semangat berupa moril dan materil serta doa yang telah diberikan selama pembuatan skripsi.
6. Bapak Zainuar, S.Pd. M.Pd sebagai Kepala sekolah SDN 11 Pudung, Ibu Mardhawati, S.Pd, SD sebagai kepala sekolah SDN 16 Kampung Parit, BatuKambing, Ibu Salmidawati, S.Pd sebagai kepala sekolah

SDN 56 Sikabu, Ibu Melita, S.Pd.SD sebagai kepala sekolah SDN 49 Batu Hampar, Bapak Badrison sebagai penjaga sekolah SDN 56 Sikabu, Bapak Arlen sebagai penjaga sekolah SDN 49 Batu Hampar, Bapak Ambrizal sebagai penjaga sekolah SDN 11 Pudung, Bapak Yasman sebagai penjaga sekolah SDN 16 Kampung Parit, BatuKambing, Bapak Datuak nyelo yasir sebagai tokoh masyarakat. Yang dengan senang hati menyediakan waktu untuk memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.

7. Seluruh rekan seperjuangan, Ica, Maya, Kak ii, Nayni dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penyelesaian skripsi.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Studi Relevan	9
2. Kerangka Konseptual.....	14
3. Kerangka berpikir.....	18
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II.....	21

GAMBARAN UMUM WILAYAH DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM.....	21
A. Keadaan Geografis.....	21
B. Keadaan Penduduk.....	25
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	28
D. Bidang Pendidikan.....	28
 BAB III.....	32
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA MASA ORDE BARU.....	32
A. Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru.....	33
B. Kebijakan Pendidikan Terhadap Sekolah Inpres.....	36
C. Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung.....	39
1. Latar Belakang dan Perkembangan SD Inpres di Kecamatan Lubuk Basung	40
a. SD Inpres Pudung, Bawan.....	45
b. SD Inpres Kampung Parit, BatuKambing.....	49
c. SD Inpres Sikabu, Lubuk Basung.....	52
d. SD Inpres Batu Hampar, Lubuk Basung.....	55
2. Dampak pembangunan SD Inpres di Kecamatan Lubuk Basung.....	58
 BAB IV.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. SD Inpres di Kecamatan Lubuk Basung.....	8
Tabel 2. Daftar Nagari dan jorong di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung.....	23
Tabel 3. Kecamatan Lubuk Basung tahun 1998.....	24
Tabel 4. Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Lubuk Basung.....	25
Tabel 5. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Lubuk Basung.....	27
Tabel 6. Listrik masuk Desa/Nagari tahun 1979 di Kabupaten Agam.....	28
Tabel 7. Penyebaran Sekolah.....	31
Tabel 8. Pengeluaran Anggaran pembangunan Hankam dan dana pembangunan dalam APBN.....	32
Tabel 9. Pembinaan Pendidikan Masyarakat.....	35

Tabel 10. Alokasi dana pembangunan pusat di Sumatera Barat Pelita I s.d tahun I Pelita VI.....	42
Tabel 11. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Basung berdasarkan sensus penduduk.....	43
Tabel 12. Penyebaran sekolah di Kabupaten agam.....	44
Tabel 13. Jumlah siswa dan guru tahun 1979-1994 di SD Inpres Pudung.....	48
Tabel 14. Alokasi Dana pembangunan Pusat di Sumatera Barat.....	49
Tabel 15. Jumlah siswa dan guru SD Inpres di BatuKambing.....	53
Tabel 16. Jumlah siswa dan guru SD Inpres di Sikabu.....	55
Tabel 17. Aspek pembangunan SD Inpres Batu Hampar.....	58
Tabel 18. Jumlah siswa dan guru SD Inpres Batu Hampar.....	59

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Kerangka Berfikir penelitian.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Informan.....	66
Lampiran 2. Pedoman wawancara.....	68
Lampiran 3. Sertifikat Tanah SD Inpres pudung.....	69
Lampiran 4. Surat keterangan wakaf tanah SD Inpres Kampung canigo, BatuKambing.....	73
Lampiran 5. Sertifikat tanah SD InpreS kampung caniago, BatuKambing.....	74
Lampiran 6. Sertifikat tanah SD Inpres Sikabu, Lubuk Basung.....	79
Lampiran 7. Serrtifikat tanah SD Inpres Batu Hampar, Lubuk Basung.....	84
Lampiran 8. Peta Kecamatan Lubuk Basung.....	89
Lampiran 9. Surat Tugas Pembimbing.....	90
Lampiran 10. Surat Izin dari Fakultas Ilmu Sosial.....	91

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian dari Camat Lubuk Basung.....	92
Lampiran 12. Surat Izin Penelitian dari Camat Ampek Nagari.....	93
Lampiran 13. Surat Izin pengambilan data ke BPS Kabupaten Agam.....	94
Lampiran 14. Surat Izin penelitian Fakultas Ilmu Sosial Kesbangpool.....	95
Lampiran 15. Surat Izin Penelitian dari SD Negeri 11 pudung.....	96
Lampiran 16. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari SDN 11 Pudung.....	97
Lampiran 17. Surat Izin Penelitian dari SDN 16 Kampung Parit, BatuKambing.....	98
Lampiran 18. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari SDN 16 Kampung Parit, BatuKambing.....	99
Lampiran 19. Surat Izin Penelitian dari SDN 56 Sikabu, Lubuk Basung.....	100
Lampiran 20. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari SDN 56 Sikabu, Lubuk Basung.....	101
Lampiran 21. Surat Izin Penelitian dari SDN 49 Batu Hampar, Lubuk Basung.....	102
Lampiran 22. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari SDN 49 Batu Hampar, Lubuk Basung.....	104
Lampiran 23. Foto Dokumentasi Penelitian.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Bergantinya pemerintahan Orde Lama ke Pemerintahan Orde Baru, membuat pembangunan di sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pendidikan pada masa Pemerintahan Orde Baru mengacu kepada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XXVII/1966 yang secara umum tujuan pendidikan pada masa Orde Baru adalah untuk membantu manusia berjiwa Pancasila, cerdas, terampil berbudi pekerti luhur serta berkepribadian Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.² Permasalahan yang dihadapi pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektifitas dan efesiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional oleh sebab itu pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan pendidikan.

¹Tjahyadi Nugroho. *Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia*. Semarang: Yayasan Telapah. 1984 hal.20.

²Hasbullah, *sejarah pendidikan islam di Indonesia*: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan. hlm.81-82.

Kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah Orde Baru adalah *pertama*, melanjutkan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1972 dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan keterampilan tertentu; *kedua*, melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta keterampilan; *ketiga*, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebagai kebutuhan praktis; *keempat*, mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar dan sebagainya; *kelima*, pembinaan generasi muda melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa Kampus, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), atau organisasi kepemudaan lainnya; *keenam*, dilaksanakannya program orang tua asuh mulai tahun 1984.³

Soeharto, sebagai pemimpin pemerintahan pada saat itu menuangkan pokok-pokok pikiran beliau tentang pendidikan dalam pidato-pidato yang disampaikan pada berbagai kesempatan. Sebagai mandataritas MPR yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR maka presiden soeharto mengemukakan pandangan-pandangannya tentang pendidikan nasional dalam hubungannya dengan Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh

³Ary H. Gunawan "Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia". Jakarta: Bina Aksara.1986.hal. 51

karena itu pembangunan nasional merupakan pola utama di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam pembangunan nasional indonesia, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur, tidak mungkin diwujudkan dalam waktu yang singkat, sebaliknya, harus dilakukan dalam jangka waktu panjang dan melalui beberapa tahapan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pola dasar dan pola umum jangka panjang sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan. Kedua pola itu, yakni pola dasar Pembangunan Nasional dan pola umum pembangunan jangka panjang, yang dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, yang merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang yang meliputi waktu 25-30 tahun. Di dalam pola umum itu ditentukan kebijakan pembangunan dan sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dan sambung –menyambung. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Sesuai dengan jangka waktu tersebut, setiap tahap disebut Rencana pembangunan lima tahun. Kebijakan pembangunan dalam setiap Repelita didasarkan atas Pola Umum Pembangunan jangka panjang.

Dalam perkembangannya Repelita memiliki beberapa tahap Repelita 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 april 1969 setelah berhasilnya usaha-usaha stabilisasi di bidang politik dan ekonomi yang

telah dilancarkan sejak oktober 1966. Tujuan Repelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya , sedangkan sasaran yang hendak dicapai ialah sandang,pangan,perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.⁴ Di bidang Pendidikan Repelita 1 menitik beratkan pendidikan dan diarahkan kepada menciptakan sebanyak mungkin tenaga kejuruan dan tenaga teknik yang dapat membantu usaha-usaha dibidang pembangunan, kemudian lebih dari 10.000 orang guru telah ditatar. Selain itu,dilakukan pula usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam jumlah murid baik antara berbagai tingkatan pendidikan maupun antara berbagai jenis pendidikan. Selama Repelita 1 telah dibagikan telah dibagikan pula 3,6 juta buku untuk kelas 1 sekolah dasar. Selain itu, telah dibangun pula 6.000 gedung sekolah dasar sedangkan sejumlah 57.740 orang guru telah diangkat,terutama guru sekolah dasar.⁵

REPELITA II dimulai pada tanggal 1 april 1974 hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita I merupakan titik tolak bagi pelaksanaan Repelita II. Program baru yang dijalankan dalam Repelita II ialah Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat 1. Pelaksananya diserahkan kepada pemerintah daerah,se dangkan pemerintah pusat hanya memberikan pengarahan secara umum. Di bidang pendidikan, Repelita II berhasil

⁴Tim pembinaan penatar dan Bahan Penatar Pegawai Republik Indonesia , Him punan Bahan Penataran,buku III, Garis-garis Besar Haluan Negara.,hal.5-19

⁵Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. "*Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*". hal 581

melampaui target yang sudah ditentukan, baik dalam hal pembangunan gedung-gedung sekolah baru, rehabilitasi, pengangkatan guru, penyediaan buku-buku pelajaran, maupun dalam hal peningkatan mutu pendidikan.⁶

REPELITA III dimulai pada tahun 1979-1984 pada kebijakan ini menekankan di bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor serta di bidang pendidikan melanjutkan rencana yang telah diterapkan pada repelita sebelumnya.

Berdasarkan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) tersebut terlihat bahwasannya pemerintah Orde Baru membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dilandaskan pokok-pokok pemikiran Soeharto untuk kemudian membangun Sekolah-sekolah dasar dan memperbaiki seluruh gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Pada saat itu sering disebut Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres). Seperti Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 1975/1976 kepada DPR tanggal 6 Januari 1975, yang berbunyi “Salah satu bentuk lain dari pada bantuan pengembangan untuk daerah-daerah adalah Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Program ini bertujuan untuk memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan.”

Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk pembangunan 10.000 (sepuluh ribu) gedung Sekolah Dasar di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap⁷. Pembagian jumlah gedung Sekolah

⁶*Ibid.* hal. 58

⁷Intruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 6 tahun 1975. tentang program bantuan pembangunan sekolah dasar 1975/1976. Bab II pasal 3 ayat 1 tentang jumlah pembangunan gedung sekolah dan perinciannya.

Dasar untuk tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Untuk tiap Daerah Tingkat I pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar dilakukan secara proporsional menurut perkiraan jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 dalam masing-masing Daerah Tingkat I sebagai persentase jumlah pertambahan murid antara tahun 1972 sampai dengan tahun 1978 di seluruh Indonesia. Dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) kemudian berdampak pula terhadap dunia pendidikan yaitu munculnya Instruksi Presiden tentang Sekolah Dasar atau disebut juga dengan SD Inpres.

Ketentuan tentang SD Inpres ini telah tercantum dalam Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD.⁸ Dalam proses pembangunan SD Inpres dimulai pada tahun 1973 dengan Inpres No. 10 tahun 1973 No.6 tahun 1974. Dalam rencana kegiatan tersebut tidak saja pembangunan gedungnya tetapi juga meliputi beberapa hal seperti: pembangunan gedung baru, pembangunan tambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung, penyediaan guru SD Inpres, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, pembangunan rumah dinas penjaga sekolah, pembangunan perumahan guru-guru.

Adanya *Bonanza minyak* membuat Indonesia mendapatkan keuntungan dimana pembangunan bantuan SD Inpres mulai dilaksanakan di setiap wilayah Indonesia secara bertahap. Tingginya angka kelahiran di

⁸G. Dwipayayana dan Nazarudin Sjamsuddin. *Jejak langkah pak harto 27 maret 1973- 23 maret 1978*. Jakarta. PT. Citra kharisma Bunda.2003,hlm.122-123.

Kecamatan Lubuk Basung membuat masyarakat sulit mendapatkan pendidikan dasar dikarenakan jauhnya lokasi sekolah serta sekolah yang dituju sudah penuh. Dengan adanya SD Inpres ini masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. di daerah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pembangunan SD Inpres kurang lebih berjumlah 4 buah SD Inpres.

Tabel 1`. SD Inpres di Kecamatan Lubuk Basung

Sekolah Inpres	Nagari	Kecamatan
SD Inpres Pudung	Tigo Koto	Lubuk Basung
SD Inpres Batu Hampar	Manggopoh	Lubuk Basung
SD Inpres Batu Kambing	Tigo Koto	Lubuk Basung
SD Inpres Sikabu	Kampung Pinang	Lubuk Basung

Berdasarkan uraian di atas kajian mengenai Sekolah Inpres ini menarik untuk diteliti karena: Sekolah Inpres merupakan salah satu kebijakan orde baru dibidang pendidikan Kebijakan ini sangat berguna sekali bagi masyarakat kelas bawah untuk mengenyam pendidikan. Maka untuk itu penulis memberi judul penelitian ini: **Sekolah Inpres : Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan (Sekolah Inpres) Pada Masa Orde Baru: Studi kasus di Kecamatan Lubuk Basung 1979-1994.**

B. Batasan dan Rumusan masalah

Kajian ilmu sejarah memiliki ciri khas didalam penulisan,yaitu pembahasan skop ruang (*spasial*) dan batas waktu (*temporal*). Skop spasial penelitian ini adalah Sekolah inpres lubuk basung. Sebagai batas waktu (*temporal*) dalam penelitian ini sebagai batas awal adalah tahun 1979 karena pada saat ini SD inpres dibangun. sedangkan tahun 1994 dijadikan batas akhir karena pada saat itu berubahnya SD Inpres Menjadi Sekolah Dasar Negeri.

Agar penelitian ini lebih terarah tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan,maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana latar belakang munculnya sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung ?
2. Bagaimana dampak pembangunan Sekolah Inpres terhadap masyarakat di Kecamatan Lubuk basung ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya sekolah Inpres di kecamatan Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui dampak pembangunan Sekolah Inpres di Kecamatan Lubuk Basung.

D. Manfaat penelitian

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang sejarah terutama mengenai pendidikan
2. Dapat memberikan motivasi dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini
3. Referensi dalam kepustakaan ilmu sejarah dan menambah wawasan tentang lembaga.

E. Tinjauan pustaka

1. Studi relevan

Saat ini sudah banyak skripsi atau karya ilmiah yang membahas tentang kebijakan pemerintah pada masa orde baru dan relevan dengan permasalahan yang dikaji, di antaranya Skripsi **Kusnul Konik dengan judul "PERAN SOEHARTO DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU(1996-1998)"** Skripsi ini menjelaskan Tentang Masa pemerintahan Soeharto (1966-1998) dapat dibagi atas tiga periode masing-masing terdiri dari sekitar satu dekade. Masa tersebut terbagi atas masa awal, masa perkembangan/kejayaan, dan akhirnya masa penurunan/kejatuhan. Tujuan pendek dari pemerintahan Orde Baru akan segera disusun, yaitu mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing.

Banyak target pembangunan Soeharto yang berhasil, Salah satunya adalah tercapainya kondisi swasembada beras. Sementara di bidang kesehatan, Presiden Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana (KB).

Dalam bidang pendidikan, Soeharto menjadi pelopor adanya proyek Wajib Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Di bidang politik, Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik.

Pada 21 Mei 1998, upaya penggulingan kekuasaan melalui jalur ekstra parlemen itu memiliki sejarah panjang. Aksi demonstrasi besar pertama terjadi pada 15 Januari 1974 atau dikenal dengan Peristiwa Malari. Bulan Juli 1997 pecah krisis moneter di Thailand yang ternyata menjalar ke wilayah Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia.

Jurnal **Toto Suharto** dengan judul **"IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ERA SOEHARTO PADA EKSISTENSI MADRASAH"**. Jurnal ini menjelaskan tentang Selama 32 tahun Soeharto (Orde Baru) berkuasa, telah banyak cara untuk melanggengkan kekuasaannya, salah satunya melalui sentralisasi madrasah dan diskriminasi madrasah sehingga ia selalu berada dalam keadaan dilematis.

Kebijakan akreditasi terhadap madrasah swasta oleh Orde Baru, dilakukan agar semua madrasah dapat dikontrol dan diawasi

keberadaannya secara sentralistik. Meskipun jumlah madrasah era Orde Baru meningkat cukup signifikan, yaitu 90%-nya berstatus swasta, namun madrasah-madrasah swasta ini muncul dan berkembang lebih didorong oleh inisiatif masyarakat Muslim Indonesia yang termotivasi oleh semangat keagamaan, bukan oleh birokrasi pendidikan Orde Baru yang sentralistik.

Di sini Orde Baru sebagai rezim birokratik-otoritarian kiranya tidak dan belum berhasil mendorong lahirnya demokratisasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan akreditasi terhadap madrasah swasta justru lebih dimaksudkan agar lembaga-lembaga swasta yang ada dapat "dibonsai" dan sedemikian rupa dapat mengikuti proses hegemoni yang dilakukannya baik secara koersif maupun persuasif.

Bahwa tujuan kebijakan akreditasi dilakukan untuk penilaian mutu madrasah swasta oleh Departemen Agama, hanya sebagai semboyan belaka. Secara politis, program akreditasi, ijazaisme dan persamaan pada zaman Orde Baru bertujuan menciptakan stabilitas politik, agar program melanggengkan kekuasaan mereka berjalan lancar. Jika melawan lakukan marjinalisasi.

Laporan **Rhoma Dwi Aria Yuliandri** dengan judul ***"DINAMIKA PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU (KEBIJAKAN DAOED DAN NUGROHO NOTOSUSANTO)"*** Laporan ini menjelaskan bahwa Daoed Joesoef memiliki beberapa kebijakan pendidikan berkebudayaan dan sekolah menjadi pusat

budaya, membuka S2 dan S3, dan yang paling fenomenal adalah normalisasi kehidupan kampus.

Nugroho Notosusanto sebagai pengganti Daoed Joesoef memiliki kebijakan pendidikan yang condong militeris. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal dari Nugroho Notosusanto adalah penerapan PSPB. Kebijakan pendidikan Daoed Joesoef tentang Normalisasi Kehidupan Kampus masih dilaksanakan pada masa Nugroho Notosusanto. Namun kedua menteri ini memiliki konsep pendidikan yang jauh berbeda. Beberapa konsep sekolah sebagai pusat budaya (Daoed Joesoef) menurut peneliti memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif pendidikan karakter pada saat ini.

Skripsi **Mufid Fareza** dengan judul ***"DAMPAK KEBIJAKAN PEREKONOMIAN ERA ORDE BARU TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA"*** Skripsi ini menjelaskan Soeharto mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden Indonesia ke-2 pada 12 Maret 1967. Rezim Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun telah banyak membawa dampak positif maupun negatif terhadap bangsa Indonesia.

Era dimana Soeharto memimpin sering disebut dengan era Orde Baru. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi dan politik. Pentingnya aspek pemerataan

juga disadari betul dalam masa ini. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah sebutan untuk program yang dibuat oleh Soeharto.

Program Repelita tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan meningkatkan sektor industri.

Selain itu, terdapat pula keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Akan tetapi, apa yang telah menjadi capaian di atas, ternyata muncul sisi negatif yang menjadi fakta untuk dicermati. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan sumber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, serta akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, namun harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya dan paling tidak memberikan pondasi bagi keberlangsungan program selanjutnya. Selain itu, kondisi sosial politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

Karya-karya di atas membahas tentang kebijakan pemerintah pada masa orde baru dibidang pendidikan dan ekonomi oleh sebab itu, karya-karya tersebut relevan dengan pembahasan penulis. Namun yang membedakan dengan peneltian penulis dengan penelitian lainnya adalah penulis ingin melihat kebijakan pemerintah pada masa orde baru dibidang pendidikan khususnya tentang Sekolah Inpres(SD Inpres).

2. Kerangka konseptual

A. Orde Baru

Istilah Orde Baru sendiri muncul untuk menggantikan Orde Lama (istilah yang diberikan pada rezim Soekarno). Menurut para ideolog Orde Baru, struktur politik dan prosedur yang berlaku pada Orde Baru mencerminkan pendekatan Indonesia yang unik pada pengambilan keputusan, salah satunya karena memberikan tempat yang terhormat bagi konsensus dan harmoni⁹. Konsenseus dan harmoni inilah yang membuat beberapa kebijakan pendidikan juga menjadi bagiannya. Langkah awal Soeharto adalah membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan Pertama. Lewat kabinet baru ini Soeharto mulai menata semua bidang kehidupan terutama dalam bidang ekonomi dan ideologi.

⁹ David Baurchier." *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik*".2007.Hal:3

Pada pertengahan 1980an, para ideologi pemerintah mencoba mengabungkan kumpulan gagasan “indoktrinasi berskala nasional” kedalam teori negara yang bersifat koheren. Indoktrinasi pemerintah orde baru ini dilakukan dengan cara sentralistik. Ideologi yang sentralistik ini tentu saja juga memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Semua kebijakan pendidikan dilaksanakan dan dikontrol dari pusat. Pembukaan Undang-undang Dasar yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama, merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah orde baru peduli dengan masalah pendidikan. Akan tetapi peran strategis pendidikan cukup disadari oleh pemerintah orde baru sehingga pendidikan tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah orde baru tidak lebih hanya menjadi alat politik saja. Fokus pembangunan pemerintah orde barupun lebih menitik beratkan dalam bidang ekonomi. Pancasila dan P4 akhirnya menjadi salah satu kendaraan indoktrinasi politik. Pancasila benar-benar mendapat tempat istimewa buktinya siswa harus menghafalkan Pancasila tanpa tahu makna yang terkandung didalamnya dan bagaimana mengamalkannya.

Menurut pendidikan pada masa orde baru diarahkan pada penyeragaman didalam berfikir dan bertindak. Penerapan pendidikan tidak diarahkan pada peningkatan kualitas melainkan target kuantitas. Kurang pedulinya pemerintah orde baru dalam pendidikan

bisa dilihat pada awal 1980-an ketika terjadi krisis minyak yang mengganggu kestabilan ekonomi. Maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengurangi dana pendidikan. Sikap pemerintah orde baru ini juga sekaligus membuktikan bagaimana menempatkan lembaga pendidikan di bawah birokrasi negara.

B. Kebijakan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perkembangan dunia makin memperkuat pandangan dan keyakinan tentang strategisnya peranan pendidikan sebagai faktor yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik¹⁰. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan berbagai faktor yang berkaitan dengannya, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Program peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional secara substantif, yang diwujudkan dalam kompetensi yang utuh pada diri peserta didik, meliputi kompetensi akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial

¹⁰Depdiknas . *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*.2008. Hal 326

dan kompetensi moral atau modal moral¹¹. Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang diperlukan oleh setiap bangsa untuk mampu bersaing dalam era global.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah.

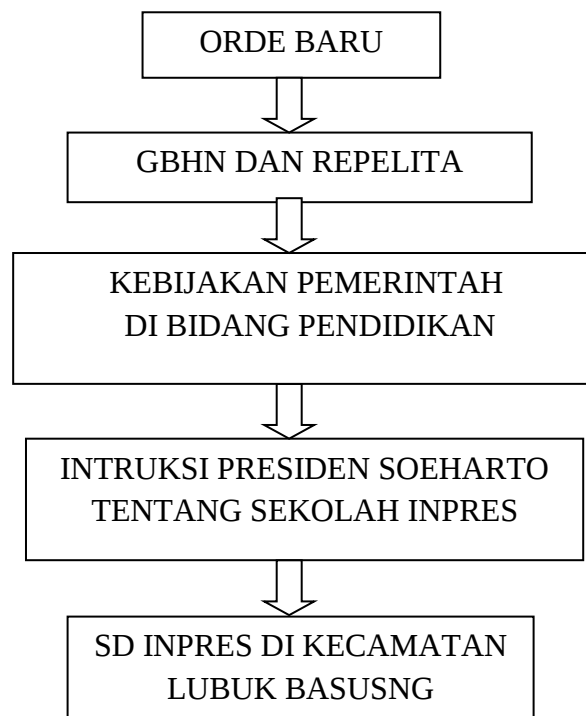
Namun demikian, upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orang tua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum. Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian¹². Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh

¹¹ Zamroni. *"Mengembangkan kultur sekolah menuju pendidikan yang bermutu"*. Makalah disampaikan pada seminar nasional mengembangkan kultur sekolah di Yogyakarta pada tanggal 23 november 2005. hal 1

¹² Djemari Mardapi. *"Pengembangan instrumen pendidikan dan Kisi-kisinya"*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2011. Hal 8

kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju kearah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan.

Kerangka Berfikir penelitian



F. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah,dalam disiplin sejarah memiliki serangkaian langkah dan prosedur kerja melalui 4 tahap¹³ :

¹³Azmi Fitrisia Dkk. (2003). *Panduan penulisan proposal dan skripsi sejarah*. Fakultas ilmu-ilmu social. Universitas Negeri Padang. Hal.4

Pertama heuristic yaitu usaha memilih suatu subjek dan mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian itu¹⁴. Data Dinas pendidikan Kabupaten Agam, Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, SDN 11 Pudung, SDN 16 Kampung Parit, SDN 56 Sikabu, SDN 49 Batu Hampar. Data diperoleh dengan langsung datang ke lapangan dan tempat terkait melalui surat izin observasi dan penelitian dari fakultas dan jurusan. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan UNP, ruang baca FIS, labor jurusan Sejarah dan perpustakaan daerah Sumatera Barat guna memperoleh bahan relevan bagi penelitian ini seperti buku-buku dan skripsi. Selain mengumpulkan data melalui sumber tertulis, juga dilakukan pengumpulan data melalui sumber lisan yaitu dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang yang ambil bagian dalam suatu kejadian proses yang sedang diselidiki.¹⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala sekolah SD inpres, penjaga sekolah, dan wawancara dengan alumni SD inpres.

Kedua kritik dokumen yang disebut juga dengan pengolahan data/analisis data, ada dua tingkat pengolahan data yaitu (1) kritik ekstern yaitu pengujian otentisitas/keaslian, sumber-sumber tentang SD inpres di Lubuk Basung yang telah dikumpulkan diuji keasliannya tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan kemampuan penulis. (2) kritik intern untuk menguji kesahihan/reabilitas isi informasi sejarah yang terkandung didalamnya. Pada prinsipnya kedua tingkat pengolahan data

¹⁴Louis Gottchalk (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia. hal 35

¹⁵Sumanto. 1990. *Metodologi penelitian social dan pendidikan* : Aplikasi Metode Kuantitatif dan statistic dalam penelitian. Yogyakarta : Andi Offset. Hal 73

ini bertujuan menyeleksi dan menyingkirkan bagian data yang tidak otentik dan kemudian menyimpulkan kebenaran data yang bisa dipercaya berupa fakta-fakta dan interpretasi mengenai fakta tersebut.¹⁶

Ketiga analisis sintesis dan interpretasi data. Analisis ialah memilah atau membedah fakta sejarah yang berkaitan dengan SD inpres di Lubuk Basung sehingga ditemukan butir-butir informasi yang kebenarannya telah diuji melalui kritik sumber. Fakta yang dikemukakan diklasifikasikan kemudian dilakukan proses merangkai data/fakta yang telah diolah kedalam unit analisis yang sesuai dengan masalah penelitian. Setelah itu dilakukan interpretasi dan eksplanasi. *Keempat* penulisan laporan penelitian yaitu penyajian temuan/rekonstruksi secara keseluruhan dalam bentuk penulisan ilmiah.

¹⁶Mestika Zed. 1999. *Metodologi Sejarah Fakultas Ilmu Sosial*. UNP. Hal 37